



# BUPATI HALMAHERA TENGAH

## P E N G U M U M A N

NOMOR : 800.1.2.2/223/IX/2024

### TENTANG

### **PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional dan Pelaksana Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis dengan rincian sebagai berikut:

#### **I. ALOKASI KEBUTUHAN PPPK**

- Jumlah alokasi kebutuhan jabatan PPPK Jabatan Fungsional sebanyak 769 (Tujuh Ratus enam puluh sembilan) formasi dengan Rincian
  - Tenaga Guru : **250 Formasi**
  - Tenaga Kesehatan : **319 Formasi**
  - Tenaga Teknis : **200 Formasi**
- Rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, masa hubungan perjanjian kerja, alokasi kebutuhan, unit penempatan dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.

#### **II. DASAR HUKUM**

- Seluruh ketentuan terkait Rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024 mengacu pada:
  - Peraturan Pemerintah Nomor **49 Tahun 2018** tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor **6 Tahun 2024** tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara.

- c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor **347 Tahun 2024** tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
  - d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor **348 Tahun 2024** tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor **349 Tahun 2024** tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
  - f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor **391 Tahun 2024** tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Teknis Tahun Anggaran 2024.
  - g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor **322 Tahun 2024** tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
  - h. SE Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : **1311/B/H.K.04.01/2024** tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK tenaga Guru Tahun 2024.
  - i. SE Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor: **PT.01/F/570/2024** tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
2. Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
  3. Seluruh pelamar **wajib** membaca ketentuan dalam aturan-aturan tersebut.

### III. PERSYARATAN PELAMARAN

#### 1. Persyaratan Umum

- a) Warga negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan
- b) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- d) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- e) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

- f) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
- g) Wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja pelamar.
- h) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
- i) Pelamar hanya dapat melamar 1 (satu) formasi PPPK pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan.
- j) Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Persyaratan Khusus

### I. Pelamar Tenaga Guru

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk **Jabatan Fungsional Guru** Tahun Anggaran 2024 Kriteria pelamar PPPK JF Guru adalah sebagai berikut:

- **Pelamar Prioritas**

Pelamar Prioritas adalah Pelamar yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru periode sebelumnya (**tidak ada lagi peserta kategori dimaksud pada Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah**).

- **Guru eks Tenaga Honorer Kategori-II (eks THK-II)**

Guru Eks THK-II adalah Pegawai yang terdaftar pada Pangkalan Data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan aktif mengajar pada instansi Pemerintah;

- **Guru Non ASN** di Instansi Daerah terdiri dari:

- Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah;
- Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar.

- Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

- Pelamar Tenaga guru yang berstatus sebagai Penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Penyandang Disabilitas Rungu tidak dapat melamar pada JF Guru Bahasa Indonesia;
- b) Penyandang Disabilitas Daksa tidak dapat melamar pada JF Guru Pendidikan jasmani, olahraga dan Kesehatan;
- c) Penyandang Disabilitas Netra tidak dapat melamar pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan;
- Pelamar prioritas, guru eks Tenaga Honorer Kateori II (eks THK-II), guru non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di instansi daerah, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar;
- Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik yang Linear dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi 100 % dari nilai paling tinggi seleksi Kompetensi;
- Urutan kelulusan bagi pelamar prioritas berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a) Guru Eks THK-II
  - b) Guru Non-ASN yang terdata pada Pangkalan Data BKN;
  - c) Guru Non ASN yang aktif bekerja minimal 2 tahun pada instansi Pemerintah Daerah;
  - d) Lulusan PPG

## II. Pelamar Tenaga Kesehatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk **Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan** Tahun Anggaran 2024, pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Eks Tenaga Honorer Kategori-II (eks THK-II) yang terdaftar pada Pangkalan Data eks THK-II pada BKN dan aktif bekerja pada instasni Pemerintah;
- Pegawai Non ASN
  - Pegawai yang terdaftar pada Pangkalan Data Non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instasni Pemerintah;
  - pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling singkat 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
- Pelamar pada seleksi pengadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan wajib memiliki kulaifikasi pendidikan sesuai SE Dirjen Nakes Nomor: **PT.01.03/F/570/2024**;
- Pelamar dengan status Disabilitas memiliki ketentuan sebagai berikut:
  - a) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
  - b) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar;

- Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 tahun secara terus menerus di instansi pemerintah.
- Masa kerja pelamar sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan Surat keterangan dari Pimpinan Unit kerja masing-masing Pelamar;
- Urutan kelulusan bagi pelamar prioritas berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a) Eks THK-II
  - b) Pegawai Non-ASN yang terdata pada Pangkalan Data BKN;
  - c) Pegawai Non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling singkat 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus;

### III. Pelamar Tenaga Teknis

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK Tenaga Teknis adalah sebagai berikut:

- Eks Tenaga Honorer Kategori-II (eks THK-II) yang terdaftar pada Pangkalan Data eks THK-II pada BKN dan aktif bekerja pada instansi Pemerintah;
- Pegawai Non ASN
  - Pegawai yang terdaftar pada Pangkalan Data Non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi Pemerintah;
  - Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling singkat 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
- Pelamar pada seleksi pengadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai Kepmenpan RB Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Instansi Pemerintah;
- Pelamar dengan status Disabilitas memiliki ketentuan sebagai berikut:
  - c) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
  - d) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar;
- Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman kerja dibidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas dan jabatan yang dilamar saat pendaftaran paling singkat 2 tahun secara terus menerus di instansi pemerintah.
- Masa kerja pelamar sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan Surat keterangan dari Pimpinan Unit kerja masing-masing Pelamar;
- Urutan kelulusan bagi pelamar prioritas berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - d) Eks THK-II
  - e) Pegawai Non-ASN yang terdata pada Pangkalan Data BKN;
  - f) Pegawai non- ASN yang tidak terdata dan bekerja pada instansi Pemerintah minimal 2 Tahun secara terus menerus;

#### IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id/>.
2. Sebelum melakukan pendaftaran, pelamar wajib membaca dan memahami Buku Panduan Pendaftaran CASN 2024 yang tersedia pada portal <https://sscasn.bkn.go.id/>
3. Seluruh Pelamar wajib membuat akun SSCASN dengan menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data Dukcapil.
4. Pada saat melamar pada SSCASN, pelamar wajib memiliki nomor WhatsApp dan e-mail yang masih aktif/berlaku.
5. Pada saat mendaftar dan mengisi data/dokumen di portal <https://sscasn.bkn.go.id/> pelamar wajib membaca dan memahami setiap petunjuk/ perintah/ keterangan/ informasi yang ditampilkan pada portal SSCASN.
6. Apabila pada saat mendaftar kemudian pelamar terkendala terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK), silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
7. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional sesuai dengan kualifikasi Pendidikan.
8. Pendaftaran dan Seleksi Administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>

#### V. DOKUMEN PERSYARATAN UMUM YANG WAJIB DI UNGGAH

Setiap pelamar wajib melengkapi dokumen persyaratan yang diunggah dari dokumen **ASLI** (bukan fotocopy). Dokumen unggahannya harus terlihat dan terbaca dengan jelas. Format dan ukuran/size file sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran, yang terdiri dari:

1. Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah ditandatangani pelamar dan dibubuhi meterai elektronik atau materai Konvensional (tempel); *(format pernyataan dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini);*
2. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Tengah yang sudah ditandatangani pelamar dan dibubuhi meterai elektronik atau materai Konvensional (tempel); *(format pernyataan dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini);*
3. Surat Keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) s.d. 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar (Lihat ketentuan pada Kepmen PANRB No. 349 Tahun 2024). *(bagi pelamar PPPK tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan).*
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku.
5. Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. *(bagi pelamar PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan).*

6. Ijazah Asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Transkrip Nilai Asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Pasfoto **terbaru** Menggunakan kemeja putih polos dan atau jilbab hitam polos (bagi yang berhijab) berlatar belakang berwarna merah;
9. Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pelamar JF Tenaga Kesehatan pada jabatan yang mempersyaratkan.
10. Dokumen sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis (sesuai Kepmenpan RB Nomor 391 Tahun 2024) yang dipersyaratkan sesuai kebutuhan Jabatan.

## VI. TAHAPAN PELAKSANAAN

### **Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Prioritas ( Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks THK-II dan Tenaga Non ASN yang terdata dalam Pangkalan Data BKN**

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d 1 November 2024
5	Masa Sanggah (*)	2 s.d 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Sanggah (*)	5 s.d 11 November 2024
8	Penarikan Data Final	12 s.d 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d 1 Desember 2024
11	<b>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi</b>	2 s.d 19 Desember 2024
12	Pengelolaan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	24 s.d 31 Desember 2024
14	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	10 s.d 21 Desember 2024

15	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	13 s.d 28 Desember 2024
16	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	24 s.d 31 Desember 2024
17	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d 31 Januari 2025
18	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d 28 Februari 2025

Keterangan:

(\*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 tahun 2024

(\*\*) : Instansi Tidak melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

(\*\*\*) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Tambahan dan Mendapat persetujuan Menteri PAN RB

**Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah)**

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Sanggah (*)	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan Data Final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan (***)	25 April s.d. 17 Mei 2025
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d. 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	22 s.d. 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
19	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Keterangan:

(\*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 tahun 2024

(\*\*) : Instansi Tidak melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

(\*\*\*) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Tambahan dan Mendapat persetujuan Menteri PAN RB



## VII. LAIN-LAIN

1. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan;
2. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan, atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Segala Kelalaian dan/atau Kesalahan peserta dalam membaca dan memahami informasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kab. Halmahera Tengah tahun 2024 menjadi tanggung jawab peserta.
4. Informasi resmi terkait seleksi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional hanya dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan Media Sosial resmi (Facebook) BKPSDM Halteng (Official Akun);

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Weda

Pada Tanggal : 30 September 2024

---

Pj. Bupati Halmahera Tengah

**BAHRI SUDIRMAN**

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI****NOMOR : 329 TAHUN 2024****TANGGAL : 2 AGUSTUS 2024**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>UNIT PENEMPATAN</b>	<b>JUMLAH FORMASI</b>
1	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA BUDHA	<b>Sesuai SE Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : 1311/B/H.K.04.01/2024</b>	DINAS PENDIDIKAN	1
2	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU		DINAS PENDIDIKAN	1
3	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM		DINAS PENDIDIKAN	17
4	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK		DINAS PENDIDIKAN	11
5	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN		DINAS PENDIDIKAN	33
6	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA		DINAS PENDIDIKAN	1
7	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS		DINAS PENDIDIKAN	3
8	GURU AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING		DINAS PENDIDIKAN	30
9	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPA		DINAS PENDIDIKAN	1
10	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPS		DINAS PENDIDIKAN	2
11	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD		DINAS PENDIDIKAN	41
12	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-TK		DINAS PENDIDIKAN	25
13	GURU AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA		DINAS PENDIDIKAN	1
14	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES		DINAS PENDIDIKAN	53
15	GURU AHLI PERTAMA - GURU PPKN		DINAS PENDIDIKAN	2
16	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN		DINAS PENDIDIKAN	1
17	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA		DINAS PENDIDIKAN	12
18	GURU AHLI PERTAMA - GURU TIK		DINAS PENDIDIKAN	15
<b>J U M L A H</b>				<b>250</b>

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR : 329 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2024

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor: PT.01/F/570/2024	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PATANI	2
2	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS BANEMO	2
3	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PATANI	1
4	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MESA	1
5	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PULAU GEBE	3
6	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN	1
7	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TEPELEO	1
8	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   KEPEGAWAIAN	5
9	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GEMIA	3
10	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WEDA	1
11	APOTEKER AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KOBE	1
12	APOTEKER AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SAGEA	1
13	APOTEKER AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TEPELEO	1
14	APOTEKER AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PATANI	1
15	APOTEKER AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS BANEMO	1
16	APOTEKER AHLI PERTAMA		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - INSTALASI FARMASI	2
17	APOTEKER AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MESA	1
18	APOTEKER AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GEMIA	1
19	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS BANEMO	1
20	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TEPELEO	2
21	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LELILEF	1
22	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PATANI	1
23	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - INSTALASI FARMASI	5
24	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MESA	1
25	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SAGEA	2
26	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KOBE	1
27	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DAMULI	1
28	BIDAN AHLI PERTAMA		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - SIMRS RAWAT JALAN & RAWAT INAP	5
29	BIDAN AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LELILEF	1
30	BIDAN AHLI PERTAMA		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   POLIKLINIK   - PENYAKIT DALAM	1
31	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GEMIA	9
32	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WAIRORO	8
33	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PULAU GEBE	6
34	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KOBE   PUSTU DESA WOEKOB	1

35	BIDAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor: PT.01/F/570/2024	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DAMULI   PUSTU DESA SAKAM	1
36	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WEDA   GOENG	1
37	BIDAN TERAMPIL		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - SIMRS RAWAT JALAN & RAWAT INAP	2
38	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SAGEA   PUSTU FRITU	1
39	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS BANEMO	7
40	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LELILEF   LELILEF SAWAI	2
41	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WEDA   NUSLIKO	1
42	BIDAN TERAMPIL		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   INSTALASI GAWAT DARURAT & IGD PONEK	1
43	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TEPELEO	4
44	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WEDA   SIDANGA	1
45	BIDAN TERAMPIL		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   POLIKLINIK   - KANDUNGAN	1
46	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SAGEA	2
47	BIDAN TERAMPIL		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   RUANG PERAWATAN ANAK	3
48	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WAIRORO   PUSTU DESA SUMBER SARI	1
49	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LELILEF	4
50	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DAMULI	5
51	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WAIRORO   PUSTU DESA KLUTING JAYA	1
52	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KOBE	2
53	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LELILEF   LUKULAMO	1
54	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WEDA	3
55	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MESA	4
56	BIDAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PATANI	2
57	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MESA	1
58	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   MEDIS	13
59	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SAGEA	2
60	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PATANI	1
61	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - LOKET 1 X 24 JAM & SEP BPJS	1
62	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GEMIA	1
63	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PATANI	1
64	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TEPELEO	1
65	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KOBE	1
66	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SAGEA	1
67	NUTRISIONIS TERAMPIL	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DAMULI	1	
68	NUTRISIONIS TERAMPIL	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SAGEA	2	
69	NUTRISIONIS TERAMPIL	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KOBE	1	
70	NUTRISIONIS TERAMPIL	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TEPELEO	1	
71	NUTRISIONIS TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - SIMRS RAWAT JALAN & RAWAT INAP	1	
72	NUTRISIONIS TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - INSTALASI GIZI	1	

73	NUTRISIONIS TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor: PT.01/F/570/2024	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MESA	3
74	NUTRISIONIS TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS BANEMO	1
75	NUTRISIONIS TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PULAU GEBE	1
76	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GEMIA	1
77	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - LOKET 1 X 24 JAM & SEP BPJS	2
78	PERAWAT AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PULAU GEBE	1
79	PERAWAT AHLI PERTAMA		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   INSTALASI GAWAT DARURAT & IGD PONEK	5
80	PERAWAT AHLI PERTAMA		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - SIMRS RAWAT JALAN & RAWAT INAP	1
81	PERAWAT AHLI PERTAMA		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   POLIKLINIK   - BEDAH	1
82	PERAWAT AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TEPELEO	3
83	PERAWAT AHLI PERTAMA		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - IPCN	1
84	PERAWAT AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KOBE	2
85	PERAWAT AHLI PERTAMA		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   INTENSIVE CARE UNIT	1
86	PERAWAT AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS BANEMO	1
87	PERAWAT AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MESA	2
88	PERAWAT AHLI PERTAMA		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   RUANG PERINATAL	1
89	PERAWAT AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GEMIA	2
90	PERAWAT AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WAIRORO	2
91	PERAWAT TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LELILEF	3
92	PERAWAT TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LELILEF   KOBE	1
93	PERAWAT TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DAMULI	3
94	PERAWAT TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PULAU GEBE	5
95	PERAWAT TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GEMIA	4
96	PERAWAT TERAMPIL		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   POLIKLINIK   POLI UMUM	6
97	PERAWAT TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SAGEA	2
98	PERAWAT TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PATANI	2
99	PERAWAT TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WEDA   SIDANGA	1
100	PERAWAT TERAMPIL		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   INSTALASI GAWAT DARURAT & IGD PONEK	6
101	PERAWAT TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   RUANG PERINATAL	1	
102	PERAWAT TERAMPIL	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS BANEMO	5	
103	PERAWAT TERAMPIL	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WEDA   NUSLIKO	1	
104	PERAWAT TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   INTENSIVE CARE UNIT	1	
105	PERAWAT TERAMPIL	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LELILEF   LELILEF SAWAI	1	
106	PERAWAT TERAMPIL	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TEPELEO	10	
107	PERAWAT TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   RUANG PERAWATAN UMUM	2	
108	PERAWAT TERAMPIL	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WAIRORO	3	
109	PERAWAT TERAMPIL	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LELILEF   LUKULAMO	1	
110	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - REKAM MEDIK	2	

111	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	<b>Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor: PT.01/F/570/2024</b>	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - REKAM MEDIK	4
112	PEREKAM MEDIS TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SAGEA	1
113	PEREKAM MEDIS TERAMPIL		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - SIMRS RAWAT JALAN & RAWAT INAP	3
114	PEREKAM MEDIS TERAMPIL		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - VERIFIKATOR BPJS	7
115	PEREKAM MEDIS TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WEDA	1
116	PEREKAM MEDIS TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KOBE	1
117	PEREKAM MEDIS TERAMPIL		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - REKAM MEDIK	4
118	PEREKAM MEDIS TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TEPELEO	1
119	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	2
120	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GEMIA	1
121	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	1
122	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - UNIT TRANSFUSI DARAH	3
123	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS BANEMO	1
124	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MESA	1
125	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SAGEA	2
126	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PATANI	3
127	RADIOGRAFER TERAMPIL		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - INSTALASI RADIOLOGI	1
128	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - IPRS	1
129	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - UNIT TRANSFUSI DARAH	3
130	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MESA	1
131	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DAMULI	1
132	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS GEMIA	2
133	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SAGEA	1
134	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TEPELEO	1
135	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WEDA	1
136	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN	2
137	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PATANI	1
138	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS PULAU GEBE	1
139	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SAGEA	2	

140	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	<b>Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor: PT.01/F/570/2024</b>	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - PENYEHATAN LINGKUNGAN	1
141	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TEPELEO	3
142	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WEDA	1
143	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   PENUNJANG   - PENYEHATAN LINGKUNGAN	1
144	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS WAIRORO	1
145	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LELILEF	1
146	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MESA	1
147	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KOBE	1
148	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SAGEA	2
149	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TEPELEO	1
150	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS BANEMO	1
151	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SAGEA	1
152	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA   POLIKLINIK   - GIGI	1
153	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS KOBE	1
154	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS MESA	1
155	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL		DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DAMULI	1
<b>J U M L A H</b>				<b>319</b>

**LAMPIRAN III**  
**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**  
**NOMOR : 329 TAHUN 2024**  
**TANGGAL : 2 AGUSTUS 2024**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
1	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1
2	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	BAGIAN ORGANISASI	1
3	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	2
4	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PENAGIHAN   SUB BIDANG PENAGIHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	2
5	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN   SUB BAGIAN UMUM	2
6	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN   SEKSI ENERGI DAN SISTEM AIR MINUM	5
7	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	DINAS PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG SARANA DAN PRASARANA	5
8	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	3
9	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PLANOLOGI	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2
10	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 SOSIAL POLITIK - S-1 KOMPUTER - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN   BIDANG LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DATA CENTER, DISASTER RECOVERY CENTER DAN TIK	2
11	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEHUTANAN - S-1 KELAUTAN - S-1 EKONOMI - S-1 PERIKANAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 SOSIAL POLITIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG PERHUBUNGAN LAUT   SEKSI KEPELABUHANAN	2



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
12	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 EKONOMI - S-1 PERTANIAN - S-1 PERIKANAN - S-1 SOSIAL POLITIK	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH   BIDANG PERDAGANGAN DAN BINA PASAR	4
13	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI AKUNTANSI - S-1 KEHUTANAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 PERTANIAN - S-1 PERIKANAN - S-1 SOSIAL POLITIK	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2
14	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER SISTEM INFORMASI - S-1 EKONOMI AKUNTANSI - S-1 KEHUTANAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 PERTANIAN - S-1 PERIKANAN - S-1 SOSIAL POLITIK	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA   BIDANG KEOLAHRAGAAN	2
15	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEHUTANAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 PERTANIAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 SOSIAL POLITIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	3
16	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEHUTANAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 PERTANIAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 SOSIAL POLITIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	DINAS PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG SARANA DAN PRASARANA	2
17	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEHUTANAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 ARSITEK BANGUNAN GEDUNG - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 SOSIAL POLITIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG PENATAAN RUANG BANGUNAN	4

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
18	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL POLITIK - S-1 PLANOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG PENATAAN SUMBER DAYA AIR	4
19	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI AKUNTANSI - S-1 KEHUTANAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 PERTANIAN - S-1 PERIKANAN - S-1 SOSIAL POLITIK	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2
20	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 KELAUTAN - S-1 EKONOMI - S-1 PERIKANAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 SOSIAL POLITIK	DINAS PERIKANAN   BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PENGELOLAAN TPI	2
21	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEHUTANAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 EKONOMI - S-1 PERTANIAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 SOSIAL POLITIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	2
22	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEHUTANAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 GEODESI - S-1 SOSIAL DAN POLITIK	DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PENATAAN DAN PENATAAN PPLH	3

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
23	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEHUTANAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 PERTANIAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 PSIKOLOGI - S-1 SOSIAL POLITIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	DINAS SOSIAL   BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	1
24	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI AKUNTANSI - S-1 KEHUTANAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 PERTANIAN - S-1 PERIKANAN - S-1 SOSIAL POLITIK	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2
25	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 SOSIAL POLITIK	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG ANGGARAN   SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN	3
26	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 KELAUTAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 EKONOMI - S-1 PERTANIAN - S-1 PERIKANAN - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL POLITIK - S-1 SOSIOLOGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PAJAK BUMI BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN   SUB BIDANG PAJAK BUMI BANGUNAN	2
27	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KEHUTANAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI	1
28	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI AKUNTANSI - S-1 KEHUTANAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 EKONOMI - S-1 PERTANIAN - S-1 PERIKANAN - S-1 SOSIAL POLITIK - S-1 ILMU POLITIK - S-1 AKUNTANSI KOMPUTER	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA   BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
29	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KEHUTANAN - S-1 EKONOMI - S-1 PERTANIAN - S-1 SOSIAL POLITIK	DINAS PERTANIAN   BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	3
30	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN - S-1 EKONOMI - S-1 PARIWISATA - S-1 KEARSIPAN - S-1 SOSIAL DAN POLITIK	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA   BIDANG DESTINASI PARIWISATA DAERAH	1
31	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KELAUTAN - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 SOSIAL POLITIK - S-1 TATA KOTA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	3
32	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 KEHUTANAN - S-1 KELAUTAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 EKONOMI - S-1 PERTANIAN - S-1 PERIKANAN - S-1 HUKUM - S-1 SOSIAL POLITIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1
33	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI AKUNTANSI - S-1 KEHUTANAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 PERTANIAN - S-1 PERIKANAN - S-1 SOSIAL POLITIK	BAGIAN ORGANISASI	1

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
34	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI AKUNTANSI - S-1 KEHUTANAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 PERTANIAN - S-1 PERIKANAN - S-1 SOSIAL POLITIK	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	3
35	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI AKUNTANSI - S-1 KEHUTANAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 PERTANIAN - S-1 PERIKANAN - S-1 SOSIAL POLITIK	DINAS PENDIDIKAN   BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL   SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3
36	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 KEHUTANAN - S-1 KELAUTAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 PERTANIAN - S-1 PERIKANAN - S-1 PARIWISATA - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 SOSIAL POLITIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN	4
37	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI AKUNTANSI - S-1 KEHUTANAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 PERTANIAN - S-1 PERIKANAN - S-1 SOSIAL POLITIK	BAGIAN PEMERINTAHAN	4
38	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI AKUNTANSI - S-1 KEHUTANAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 PERTANIAN - S-1 PERIKANAN - S-1 SOSIAL POLITIK	BAGIAN UMUM	4

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
39	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEHUTANAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 EKONOMI - S-1 PERTANIAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 SOSIAL POLITIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU   BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	2
40	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 KEHUTANAN - S-1 KELAUTAN - S-1 PERTAMBANGAN - S-1 PERTANIAN - S-1 PERIKANAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 SOSIAL POLITIK - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	2
41	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	2
42	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2
43	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	DINAS PERIKANAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	2
44	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	BAGIAN ORGANISASI	2
45	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	BAGIAN UMUM	6
46	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	DINAS PERHUBUNGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	5
47	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	DINAS KETAHANAN PANGAN   BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	4
48	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM - SLTA/SMA SEDERAJAT - SMK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   BIDANG PENCEGAHAN DAN KESEPSIAGAAN	3
49	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	1
50	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM - SLTA/SMA SEDERAJAT - SMK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL	1
51	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	DINAS PENDIDIKAN   BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL   SEKSI KELEMBAGAAN SARANA PRASARANA	2
52	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	DINAS SOSIAL   BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	1
53	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	DINAS KESEHATAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	2

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
54	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SMK AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG MUTASI, PROMOSI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR   SUB BIDANG MUTASI, PENILAIAN DAN EVA	1
55	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	DINAS KESEHATAN   BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	1
56	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	3
57	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5
58	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2
59	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	BAGIAN ORGANISASI	1
60	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM - SLTA/SMA SEDERAJAT - SMK	DINAS PERTANIAN   BIDANG PERKEBUNAN	4
61	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2
62	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	4
63	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2
64	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2
65	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	2
66	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	2
67	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN   SUB BAGIAN UMUM	4
68	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	2
69	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	3
70	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	DINAS PENDIDIKAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3
71	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	DINAS PEMADAM KEBAKARAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	5
72	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SMK	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	1
73	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS	1
74	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG BINA PROGRAM DAN KONSTRUKSI	2
75	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI
76	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN - D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	BAGIAN UMUM	2
77	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH   BIDANG BINA PERINDUSTRIAN	3
78	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI - S-1 PSIKOLOGI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	DINAS SOSIAL	2
79	PRANATA TRANTIBUM	SMA IPA - PERSAMAAN SLTA (PAKET C) - SMA IPS - SLTA KEJURUAN - SMK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT   SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	8
80	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	1
<b>J U M L A H</b>				<b>200</b>



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Agama :  
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Weda, 2024  
Yang membuat pernyataan,

e-materai /  
Materai  
tempel

.....

**SURAT LAMARAN**

Weda, .....2024

**Kepada**  
**Yth. BUPATI HALMAHERA TENGAH**  
**di -**

**Weda**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Pendidikan :  
Jenis Formasi : Calon PPPK Tenaga .....  
Jabatan yang dilamar :  
Unit kerja yang dilamar :  
Alamat domisili saat ini :  
Nomor HP :  
Alamat email :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Tenaga ..... di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024.

Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Scan Asli* Surat Pernyataan 5 poin;
2. *Scan Asli* Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Halmahera Tengah, dibubuhi e-meterai dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam;
3. *Scan* Surat Keterangan Pengalaman Kerja di bidang yang sesuai kompetensi Jabatan yang dilamar;
4. *Scan Asli* Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli;
5. *Scan* Surat Keterangan Aktif Bekerja pada Instansi Pemerintah;
6. *Scan* Ijazah Asli.
7. *Scan* Transkrip Nilai Asli;
8. Pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah;
9. Surat Keterangan Registrasi (STR) yang masih berlaku; **(di isi bagi tenaga Kesehatan)**

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan Ketua Panitia Seleksi Daerah untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang membuat pernyataan,

e-meterai /  
Meterai  
tempel

ttd

(Nama Lengkap)

## KOP UNIT KERJA

---

### SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor: .....

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Instansi/Lembaga :

**Menerangkan bahwa:**

Nama :  
Jabatan yang dilamar :  
Kualifikasi pendidikan :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Alamat KTP :  
Nomor HP :

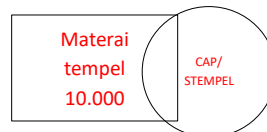
Adalah Pegawai Non ASN di ..... sebagai ..... (*isi sesuai jabatan yg dilamar*) selama ... tahun .... bulan sejak tanggal ..... s.d ..... . untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai persyaratan melaksanakan tugas kedinasan pada jabatan tersebut apabila diterima sebagai PPPK Tenaga ..... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya keterangan yang tidak benar, maka saya **siap diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana.**

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Weda ,..... 2024

Kepala Dinas



ttd

.....  
NIP: .....

## PORTOFOLIO PENGALAMAN KERJA

### 1. Identitas Diri :

- a. NIK :
- b. Nama :
- c. Tempat/Tgl lahir :
- d. Email :
- e. Nomor Tlp/Hp :

### 2. Profil pekerjaan saat ini/terakhir bekerja :

- a. Pekerjaan : Pegawai Tidak Tetap (PTT)
- b. Unit Kerja :
- c. Deskripsi Pekerjaan :

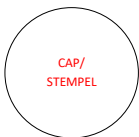
### 3. Riwayat Pekerjaan

No	Tempat	Jabatan	Masa Kerja		Surat Keputusan		
			Tgl Mulai	Tgl Selesai	Nomor	Tanggal	Pejabat Penandatanganan
1							
2							
3							
4							

Weda, ..... 2024

Mengetahui,  
**Kepala Dinas**

Yang Membuat Permohonan,



Ttd

ttd

.....  
Nip.

## KOP INSTANSI

---

### SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA

Nomor: .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Instansi : Pemerintah Kab. Halmahera Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa benar saudara ..... adalah staf pada ..... dan aktif bekerja sejak tanggal ..... sampai dengan saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2024  
(nama Jabatan)



(Nama Pimpinan Unit Kerja)  
Nip.....